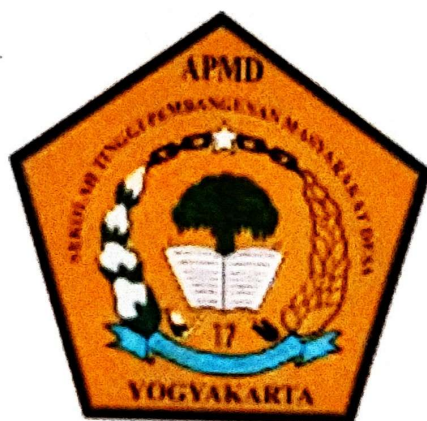


**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH PRODUK OLAHAN SALAK DI KALURAHAN
PURWOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

NESIA NERSI

NIM : 18520176

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024



i

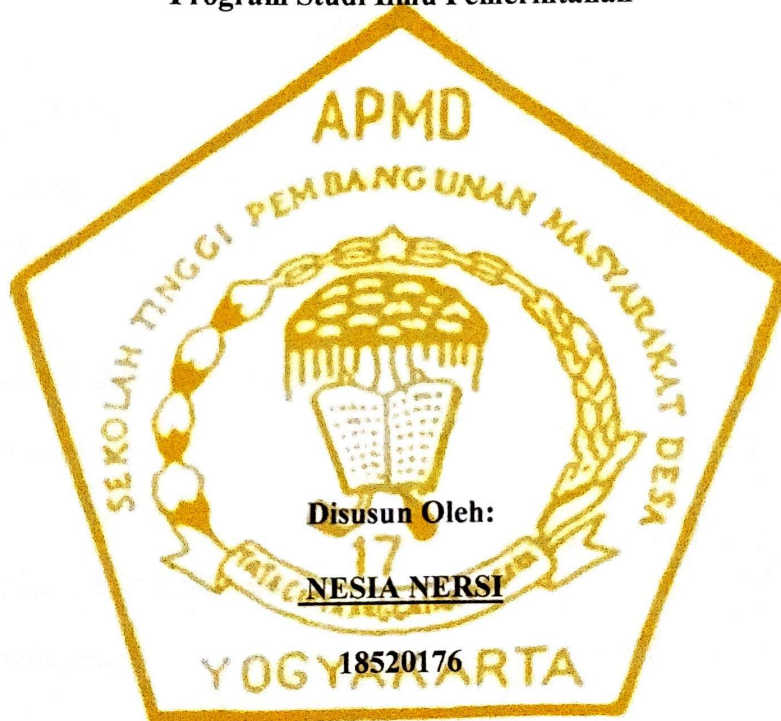
**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH PRODUK OLAHAN SALAK DI KALURAHAN
PURWOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024




ii

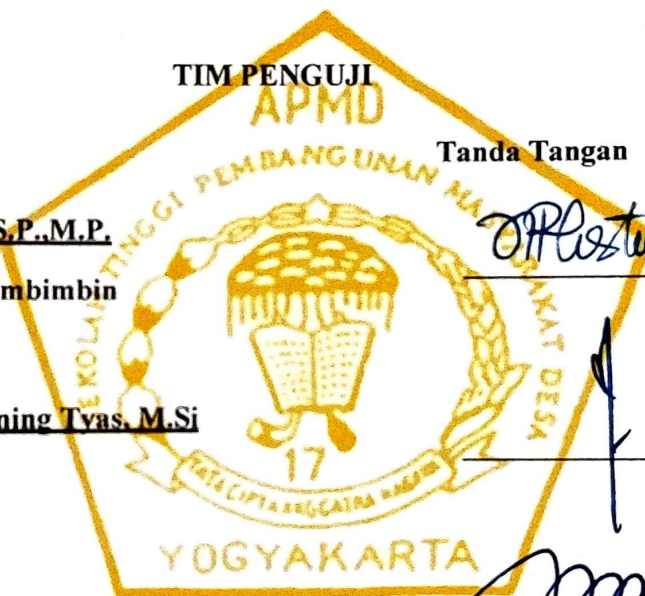
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Januari 2024
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

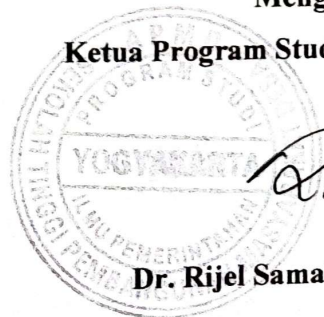
TIM PENGUJI
APMD

Nama	Tanda Tangan
<u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P.</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nesia Nersi

Nim : 18520176

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PRODUK OLAHAN SALAK DI KALURAHAN PURWOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nesia Nersi
18520176

MOTTO

“Saat kita merasa sedih dan kecewa, selalu ingat bahwa orang lain itu tidak jahat tetapi kita aja yang merasa bahwa kita itu baik”

(Nesia Nersi)

“Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu”

(Matius 19:30)

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”

(Roma 8:28)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

(Yesaya 41:10)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Allah Bapa di Surga atas kelimpahan rahmat dan kebaikannya yang tidak terhingga berupa kesehatan, kesempatan, waktu, kemampuan dan segala kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang disayangi dan dibanggakan yang diantaranya adalah:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada *support system* utama yaitu kedua orang tua saya, Juvensius Jeton dan katarina ida yang telah berusaha memberikan segala yang terbaik. Selalu memenuhi segala kebutuhan baik materi doa dukungan dan kasih sayang.
3. Kepada kakakku Meuwliawati dan abang Matius Yogi Andeni yang telah menjadi tempat cerita ternyaman serta selalu memberi dukungan baik moril maupun materil.
4. Kepada Dosen Pembimbing peneliti yaitu Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P. terima kasih karena sudah menjadi pembimbing yang bersahabat dan selalu sabar dalam membimbing peneliti dalam menyusun skripsi. Terima kasih atas kesan baik yang selalu Ibu berikan, semoga kiranya Ibu sehat selalu dan semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu berkali lipat ganda.
5. Kepada Lurah Kalurahan Purwobinangun beserta segenap Pamong Kalurahan Purwobinangun dan masyarakat Purwobinangun yang telah bersedia menerima kehadiran peneliti sekaligus membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena sudah menerima peneliti dengan hangat dan nyaman, semoga kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian.

6. Kepada teman-teman dan sahabat perkuliahan yang kenal pada awal masuk perkuliahan, peneliti mengucapkan terima kasih banyak dengan memberikan dukungan dan motivasi diantaranya yaitu Sendy Elyna Insani, Lidya Bellayanda Simanjuntak, Naomber Prapasini yang sudah membantu proses penyusunan skripsi. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada Vika, Nana, Mami Okta yang sudah menjadi teman yang luarbiasa pula dan teman-teman tercinta semuanya yang tidak bisa peneliti sebutkan semua.
7. Untuk kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dan KOMAP yang telah menjadi tempat saya berproses, belajar, menambah ilmu dan pengalam-pengalaman yang berharga.
8. Kepada bayi ajaib Cipung kesayangan (Rayyanza Malik Ahmad), terimakasih telah menjadi *moodbooster* dengan tingkah yang lucu dan menggemaskan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Allah Yesus Kristus YME atas karunia dan rahmatnya yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Olahan Salak”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan nasehat, doa, dan saran-saran yang bermanfaat. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, mereka tidak sendirian dalam mengerjakannya, dan dengan segala kerendahan hati, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P. selaku Dosen Pembimbing tercinta, yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada peneliti dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Purwobinangun yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama peneliti melaksanakan penelitian.

6. Orang tua, sahabat dan teman-temn semua yang telah memberikan dukungan, dorongan serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti di masa mendatang.

Yogyakarta, 2024

Peneliti

Nesia Nersi

INTISARI

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PRODUK OLAHAN SALAK DI KALURAHAN PURWOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

Nama : Nesia Nersi

Nim : 18520176

Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman terkenal dengan pertanian salaknya. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah Kabupaten Sleman melalui Gapoktan mengadakan pelatihan untuk pengolahan salak menjadi makanan dan minuman yang sehat, seperti membuat geplak, jenang, dan manisan salak. Dalam hal ini harusnya pemerintah Kalurahan lebih memperhatikan pemberdayaan UMKM, namun realitanya keterlibatan Pemerintah belum terlihat dalam pemberdayaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana keterampilan, pengetahuan, motivasi, serta faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kalurahan Purwobinangun dalam pemberdayaan UMKM demi kesejahteraan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan yang dianggap mampu dan berkaitan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Perangkat kalurahan, Ketua UMKM, dan petani, penelitian berlokasi di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dari penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM produk olahan salak di Kalurahan Purwobinangun, pendampingan yang lebih maksimal terhadap pelaku UMKM diharapkan mampu diberikan oleh Pemerintah Kalurahan, sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengembangkan UMKM demi terwujudnya kesejahteraan pelaku UMKM. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah kalurahan masih belum memberikan dampak yang besar dalam perkembangan UMKM, karena jika dilihat dari keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan faktor penghambat serta pendukung dalam pemberdayaan UMKM, kapasitas Pemerintah kurang berperan secara penuh.

Kata kunci : Kapasitas, Pemberdayaan, UMKM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Literature Review.....	4
G. Kerangka Konseptual	9
1. Kapasitas Pemerintah	9
2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Subyek Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	14
4. Jenis dan Sumber Data	14
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data.....	17
BAB II DESKRIPSI PROFIL DESA	19
A. Gambaran Umum Kalurahan Purwobinangun	19
1. Visi Misi Lurah.....	19
2. Profil Kalurahan	20
3. Kebijakan Pendapatan	25

4.	Kebijakan Belanja.....	30
5.	Kebijakan Pembiayaan	33
6.	Pemerintah Kalurahan	34
7.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJM Kalurahan	35
B.	Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kalurahan Purwobinangun.....	36
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN		37
A.	Keterampilan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	38
B.	Pengetahuan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	42
C.	Motivasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	45
D.	Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM Produk Olahan Salak	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN.....		55

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Informan.....	14
2.1 Tabel Penjelasan Visi.....	55
2.3 Tabel Jumlah Penduduk Bulan Oktober 2023	20
2.4 Tabel Perubahan Komposisi Penduduk 2019-2022 Menurut Jenis Kelamin.....	21
2.5 Tabel Jumlah Penduduk Bulan Oktober 2023 Menurut Mata Pencapaian Utama	58
2.6 Tabel Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2022 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dalam KK.....	22
2.7 Tabel Jumlah Layanan Posyandu Di Kalurahan Purwobinangun Bulan Oktober Tahun 2023	23
2.8 Tabel Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2022.....	60
2.9 Tabel Besaran Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2015-2021	26
2.10 Tabel Besaran Dana Tranfer Yang Diterima Kalurahan Purwobinangun Tahun 2019-2022.....	29
2.11 Tabel Realisasi Belanja Per Bidang Kewenangan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2019-2022.....	32
2.12 Tabel Permasalahan Bidang Kewenangan Kalurahan dan Permasalahan Dari Kajian Padukuhan....	61
2.13 Tabel UMKM Kalurahan Purwobinangun	63

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman terkenal dengan pertanian salaknya. Hampir mayoritas masyarakat di Kalurahan Purwobinangun bermata pencaharian sebagai petani salak, mereka menggantungkan hidupnya dengan hasil penjualan salak. Namun ketika memasuki musim panen hasil panen yang melimpah kemudian berdampak pada harga jual yang menurun, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi para petani salak, karena tidak semua hasil panen dapat terjual. Sehingga disini masyarakat dituntut kreatif mengubah buah salak menjadi produk olahan untuk meningkatkan nilai jualnya. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah Kabupaten Sleman melalui Gapoktan mengadakan pelatihan untuk pengolahan salak menjadi makanan dan minuman yang sehat, seperti membuat geplak, jenang, dan manisan salak.

Salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat yaitu melalui pemberdayaan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tugas pemerintah sebagai *Connecting* (menghubungkan), maka pemerintah berperan penting dalam pemberdayaan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah serta

kebutuhan dari masyarakat kalurahan. Pemerintah juga memiliki kapasitas dalam pemberdayaan untuk menuju perubahan bagi masyarakat kearah yang lebih baik.

Pada penelitian ini akan membahas terkait bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan UMKM Produk Olahan Salak, dalam hal ini menjadi satu dari sekian mata pencaharian yang paling digeluti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, kabupaten Sleman. Sehingga harus mendapat perhatian serta dukungan yang memadai dari Pemerintah Kalurahan agar UMKM dapat selalu eksis di skala lokal maupun nasional.

UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang berperan sebagai pelaku ekonomi nasional, diharapkan mampu memberikan pelayanan publik dibidang ekonomi seperti membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun UMKM juga tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kontribusi dari para pemilik usaha, karena jika para pemilik usaha tidak bekerjasama dengan UMKM maka pembangunan perekonomian yang diidamkan tidak akan tercapai. Keduanya harus saling melengkapi agar dapat menciptakan kestabilan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keberhasilan dalam pembangunan perekonomian yang akan memberikan dampak bagi masyarakat lokal maupun nasional.

Pada penelitian ini akan menggali potensi yang sekiranya dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan, maka akan dilihat pihak mana saja yang bisa diberikan kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab tersebut. UMKM diharapkan mampu mengambil peran serta dalam proses pengembangan ide-ide untuk pengolahan makanan dari salak, agar dalam prosesnya dapat tercapai secara efektif, efisien dan inovatif. Maka Pemerintah Kalurahan beserta UMKM harus bekerjasama agar terciptanya hasil yang memuaskan dalam pemberdayaan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Keterampilan Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun
2. Pengetahuan Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun
3. Motivasi Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun
4. faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas rumusan masalah yang didapat adalah: “Bagaimana kapasitas pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM produk olahan salak” di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diambil berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tercantum diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui Keterampilan Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun.
2. Untuk mengetahui Pengetahuan Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun.

3. Untuk mengetahui Motivasi Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM di Kalurahan Purwobinangun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara teori akademis, penulis dan pembaca dapat mengambil manfaat dari hal ini dengan berpikir *out of the box* dan mempelajari lebih banyak bagian dari kemampuan pemerintah Kalurahan. Selain itu, ditambahkan ide-ide dan konsep-konsep segar yang dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian tambahan di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi secara praktis bagi Pemerintah Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman dalam melakukan suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

F. Literature Review

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, ditampilkan sebagai berikut :

1. “Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Keripik Salak UMKM Salak Cristal Di Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta” jurnal penelitian oleh Virekha Yolanda (2020). Berdasarkan hasil dari penelitian yang di sebutkan di atas dapat disimpulkan

bahwakriteria puas menjadi nilai yang dihasilkan dari tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut produk keripik salak UMKM Salak Cristal. Adapun strategi pemasaran yang diterapkan UMKM Salak Cristal dalam upaya menambah tingkat kepuasan konsumen, yaitu promosi online, lokasi toko, variasi rasa, penjualan online, seragam karyawan, display sesuai rak produk yang tersedia, kerapihan karyawan, proses pembayaran, dan label harga produk.

2. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan” jurnal penelitian oleh Ferry Duwi Kurniawan Luluk Fauziah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang diberikan pemerintah itu kurang maksimal, karena hanya memberikan modal usaha tanpa memberikan pelatihan bagi pengembangan UMKM. Namun terdapat faktor pendukung diantaranya adalah terdapatnya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, murahya bahan baku serta juga mudah ditemukan,ringannya modal usaha yang dikeluarkan, aparaturnya desa yang sangat mendukung, pasokan bahan baku yang stabil dari pemasok dan kesepakatan antar anggota kelompok usaha mengenai harga jual produksi. Selain itu, hambatan yang dihadapi antara lain infrastruktur yang buruk atau tidak ada, kurangnya dukungan negara, kurangnya fasilitas pembuangan sampah, dan kurangnya saluran pemasaran barang-barang produksi.
3. “Pemberdayaan Kapasitas Usaha Kecil Unggulan Terdampak Covid-19 di Kota Bandung” jurnal penelitian oleh Dindin Abdurrahim, dkk. Dari hasil pembahasan dalam jurnal ini menunjukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Kapasitas kepemilikan unit Mesin pada mitra usaha kecil,
 - 2) Meningkatkan Kapasitas pemahaman, dan penerapan Organisasi bisnis dan memahami dan menerapkan fungsi Manajemen bisnis Usaha kecil, seperti perencanaan,

pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian usaha. dan

- 3) Meningkatkan kapasitas atau kemampuan mengenai maksud, tujuan, fungsidan kegunaann dari Dukumen Rencana Usaha (*Business Plan*) bagi Usaha kecil.
4. “Peningkatan Kapasitas Pelaku Mikro Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Desa Anggrawati melalui Kegiatan Pendampingan ”jurnal penelitian oleh Amelia Paramitha Mahanani, dkk. Dari hasil pendampingan untuk UMKM hasil perkebunan ialah pelaku UMKM memperlihatkan antusias selama berjalannya kegiatan-kegiatan. Para pelaku UMKM telah berhasil merencanakan logo dan label untuk melakukan *rebranding* namun belum bersedia merubah logo ke depannya, UMKM berhasil mendaftarkan produknya ke salah satu market place Indonesia, dan pelaku UMKM juga mempelajari hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat proposal pengajuan dana.
5. “Penguatan Tata Kelola dan Pemasaran Olahan Salak untuk Wisatawan Mancanegara” jurnal penelitian oleh Muchammad Ichsan dan Titiek Widyastuti. Hasil dari kegiatan Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan skema IBM yang sekarang PKM tentang tata kelola dan pemasaran aneka olahan salak ini dimulai bulan April 2017 dengan melakukan koordinasiprogram dengan mitra pengabdian yaitu Aneka Olahan Salak “Crystal” dan kripik salak “Permata”. Target dan luaran yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat ini melalui model pemberdayaan usaha aneka olahan salak. Model pemberdayaan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah tenaga pengelola yang memahami tata kelola dan pemasaran produk untuk wisatawan manca negara, kemasan aneka olahan salak berbahasa Inggris, brosur aneka olahan salak berbahasa Inggris, papan nama dan website berbahasa Inggris.
6. “Peran Dinas Perindustrian, Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Sentra

Industri Konveksi Di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus” jurnal penelitian oleh Ida Rizkiany Nur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah yang terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil namun belum maksimal, ini dapat dilihat masih adanya faktor pendukung seperti tenaga kerja yang cukup banyak dan dukungan dari pihak-pihak terkait, namun ada juga faktor yang menghambat yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia ,terbatasnya akses pemasaran,dan terbatasnya permodalan.

7. “Analisis Usaha Pengolahan Salak pada UKM Salacca di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara” jurnal penelitian oleh Dhea Apta Monica, Nina Widowati, Maesaroh (2019). Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penting dalam usaha pengolahan salak adalah faktor alat produksi yang canggih sehingga waktu dan tenaga yang terpakai dalam proses produksi lebih maksimal daripada secara manual.
8. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Salak Di Desa Ngargosoko, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang” jurnal penelitian oleh DA Monica (2021). Hasil penelitian Pemberdayaan masyarakat di Desa Ngargosoko tidak berhasil dilaksanakan karena masih banyak aspek yang belum tercapai. Sumber daya yang ada di Desa Ngargosoko memang sangat mendukung, namun kontribusi dari masyarakat masih kurang dalam kegiatan. Aspek yang hasilnya sudah sesuai antara lain akses fisik dan non fisik yang mendukung. Aspek yang tidak mendukung, yaitu partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan. Partisipasi dari masyarakat masih kurang karena mereka enggan meluangkan waktunya untuk ikut pelatihan sehingga pemberdayaan yang ada tidak bisa optimal karena kurangnya kontribusi

masyarakat. Kontrol berupa pemantauan dan pendampingan hanya dilakukan saat kegiatan berlangsung saja, sebelum dan setelah kegiatan tidak ada. Kesejahteraan masyarakat Desa Ngargosoko terutama dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan masih belum bisa sepenuhnya tercukupi jika hanya mengandalkan hasil dari panen salak saja.

9. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM” jurnal penelitian oleh Monica Dwipi Salam, Ananta Prathama (2022). Hasil penelitian pihak-pihak dalam pengembangan UMKM melaksanakan tugasnya dengan dengan baik, sebagaimana yang telah diukur melalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Kue melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Kue dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.
10. “Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang” jurnal oleh Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang, sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil menengah, sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mampu mengembangkan usahanya, tapi pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan literatur diatas yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagaimana yang terdapat dalam literatur review pendukung diatas, maka posisi penelitian ini yaitu melengkapi Kapasitas dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini mempunyai

fokus penelitian tentang faktor penghambat dan pendukung serta peran Pemerintah Kalurahan dengan masalah yang berbeda sehingga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian inilah yang menjadikan jalan bagi peneliti untuk mengarahkan pada data yang akan diambil.

G. Kerangka Konseptual

Penjelasan kerangka konsep merupakan kerangka atau cara berpikir utama dalam menuju titik akhir dalam suatu penelitian dengan perspektif untuk memahami dan memperdalam fokus penelitian.

1. Kapasitas Pemerintah

Dalam menjelaskan konsep pengembangan kapasitas beberapa ahli sosial memaknai istilah kapasitas yaitu, menurut Morgan dalam buku (DindinAbdurohim,2020) memahami sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah diterapkan dari waktu ke waktu (Milen,2004:19).

Definisi kapasitas menurut Hilton, Maher dan Selto (2003) adalah kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Kapasitas (*capacity*) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan. Menurut Moenir kemampuan berasal dari kata mampu yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan yang kemudian bisa menghasilkan barang/jasa yang diharapkan. Kemampuan juga dapat ditujukan kepada keadaan atau sifat

seseorang yang mampu melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada atau terorganisasi.

Kapasitas Pemerintah Kalurahan adalah kemampuan pemerintah Kalurahan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Geene(2003:4), mengatakan bahwa kapasitas adalah sifat yang memungkinkan sebuah organisasi atau system untuk bertahan hidup, tumbuh, difersifikasi, dan menjadi lebih kompleks.

Menurut Widjaja (2003), desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 lebih jauh desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Pemberdayaan menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim (2009), menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang

dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Sedangkan Djohani dalam Anwas 2014) menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Adapun beberapa konsep pemberdayaan, pertama *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat.

Pengertian UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Kemudian pemberdayaan UMKM adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di untuk memungkinkan mereka berkembang dan berkembang sebagai perusahaan. kokoh dan mandiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan adalah gagasan bahwa masyarakat dan organisasi harus didorong untuk mandiri dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar dan menemukan solusi terhadap permasalahan. Selain itu, inisiatif pemberdayaan secara langsung akan menghasilkan orang-orang dengan keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya unggul.

Sesuai Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro adalah perusahaan menguntungkan yang dijalankan oleh satu orang atau

lebih atau badan usaha perseorangan yang sesuai dengan definisi hukum usaha mikro, memiliki aset tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 atau penjualan tahunan Rp 300.000.000,00.

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UU No. 9 Tahun 1995) mendefinisikan UMKM sebagai badan usaha yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya berada, dan penjualan tahunannya tidak lebih dari Rp1.000.000.000. Definisi ini mencakup Usaha Mikro (UMI) serta Usaha Kecil (UK). Sebaliknya, penduduk Indonesia yang memiliki Usaha Menengah (UM) memiliki kekayaan bersih berkisar antara Rp200.000.000 dan belum termasuk bangunan dan tanah.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha mandiri, menguntungkan, yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum yang bukan merupakan divisi atau cabang dari perusahaan besar, dan mempunyai kepentingan. kekayaan bersih yang lebih rendah. mulai dari Rp 50.000.000, dengan hasil penjualan kurang dari Rp 300.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jika perusahaan kecil tidak memasukkan tanah dan bangunan, maka kekayaan bersihnya tidak boleh melebihi Rp 500.000.000. Alternatifnya, jika pendapatan penjualan tahunannya melebihi Rp 300.000.000, maka mereka tidak boleh melebihi Rp 2.500.000.000. Sebaliknya, perusahaan yang tergolong menengah mempunyai nilai bersih di atas Rp. 50.000.000.000.

H. Metode Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk mengumpulkan data untuk penerapan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013:2)

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi eksploratif merupakan metodologi yang digunakan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif eksploratif adalah metodologi yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi individu atau kelompok dalam mengatasi masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian deskriptif merupakan bagian dari penelitian ini, yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengumpulkan obyek penelitian sesuai dengan apa yang diamatinya, setelah itu temuan penelitian akan dilaporkan dan dijelaskan berdasarkan data yang tersedia

2. Subyek Penelitian

Subyek yang dimaksud dalam penelitian adalah narasumber dalam penelitian. Narasumber dari penelitian ini diambil dengan Teknik Purposive, yang mana Teknik ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sebagaimana Pokok narasumber yaitu Perangkat Desa, dan pengurus UMKM serta beberapa kelompok tani. Narasumber yang akan di wawancara dalam penelitian ini kurang lebih 10 orang, beberapa informan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.1 Tabel Informan

No.	NAMA	JABATAN
1.	PAK YUDI SUSANTO	KAMITUA Purwobinangun
2.	PAK PURWANTO	Perangkat Kalurahan Purwobinangun
3.	PAK SIGIT PURNOMO	Dukuh Ngelosari (Kelompok Tani)
4.	PAK PARJIONO	Dukuh Kemiri (Ketua Kelompok Tani)
5.	PAK AGUS PRIYANKA	Bpkal Pokja Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat
6.	IBU RINI HANDAYANI	Pemilik UMKM Sarisa Merapi dan Ketua KWT
7.	IBU RAMTIANA	Pelaku UMKM
8.	IBU TATI DWI ASTUTI	Pelaku UMKM Dodol Salak
9.	PAK WARSONO	Ulu-Ulu
10.	PAK MERU BASKORO	Penanggung Jawab UMKM Kalurahan Purwobinangun

3. Lokasi Penelitian

Kalurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dapat dikumpulkan langsung dari lokasi atau lapangan penelitian disebut data primer. Menurut Siyono dan Sodik (2015), perkataan, tindakan, dan perilaku dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Artinya dengan observasi dan wawancara, data primer dapat dikumpulkan langsung dari lapangan. Oleh karena itu, penulis mengambil informasi dari berbagai sumber. Sumber data utama penelitian ini adalah yang membahas tentang kapasitas pemerintah

kabupaten dalam memberdayakan UMKM di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta yang membahas kondisi-kondisi yang memudahkan atau menghambat pemberdayaan UMKM di daerah.

2. Data Sekunder

Menurut Siyoto dan Sidik (2015), data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari catatan, gambar, dan artefak yang akan menyempurnakan data utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data sekunder diperoleh secara tidak langsung, namun data tersebut telah dipelajari melalui penggunaan bahan-bahan tertulis dari penelitian-penelitian terdahulu, peraturan pemerintah, buku laporan, dan catatan.

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Berikut Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menghitung persentase atau besarnya temuan penelitian. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini

1. *Library research* adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan konsultasi berbagai buku yang relevan dengan topik yang dibicarakan
2. *Field research* adalah metode teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan (objek penelitian). Dokumentasi, catatan observasi, dan wawancara adalah taktik yang digunakan. Pertimbangan praktis yang meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian menyebabkan digunakannya instrumen ini. Berikut uraikan secara sederhana, bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian:
 - a. Observasi

Metode pengumpulan informasi ini melibatkan pemantauan dan pendokumentasian fenomena secara metodis yang menjadi tujuan penelitian. Salah satu cara pengumpulan informasi yang dapat diperoleh langsung dari lapangan adalah dengan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemerintah Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat akses UMKM terhadap produk olahan salak.

b. Dokumentasi

Dengan menggunakan metode ini, tinjauan pustaka dilakukan dan data dari penelitian sebelumnya seperti buku dan tesis dikumpulkan oleh peneliti. Data dari sumber non-manusia dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan dokumenter. Salah satu sumber data yang sangat krusial dalam penelitian adalah dokumen dan arsip yang berkaitan dengan topik kajian. Dokumen yang disebutkan di atas menawarkan banyak informasi yang relevan secara kontekstual dan mendasar. Studi dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan suatu kegiatan, yaitu cara peneliti melakukan penelitian sambil meneliti hal-hal yang dianggap penting. Untuk memberikan representasi visual dari rekaman, digunakan gambar. Perekaman tersebut untuk memperoleh gambaran visual tentang penerapan peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan UMKM produk olahan salak yaitu berupa foto.

c. Wawancara

Dilakukan dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan mengadakan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan, menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Oleh karena itu, jika teknik tersebut digunakan dalam penelitian maka perlu terlebih dahulu diketahui sasaran, maksud masalah yang dibutuhkan, sebab dalam suatu wawancara dapat diperoleh keterangan yang berkaitan. Peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat langsung dari penerapan peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan UMKM produk olahan salak.

6. Analisis Data

Tahap pengolahan data selanjutnya adalah analisis data, yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penerapan data untuk memecahkan masalah yang muncul selama kompilasi temuan penelitian. Ada tiga bagian utama dari konsep ini. Sebagaimana diungkapkan Huberman dan Miles dalam Sugiyono (2014). Ketiga unsur tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data karena banyak sekali data yang dikumpulkan dari lapangan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan akademisi untuk melakukan studi di lapangan, semakin banyak data yang mereka kumpulkan, dan semakin besar kompleksitas yang dihasilkan. Reduksi data digunakan untuk melakukan prosedur seleksi hasilnya. Mereduksi data meliputi pemilahan dan pengkategorian informasi, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan menyusun informasi yang telah dianalisis dan diputuskan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data mengacu pada penyusunan bahan yang berasal dari kesimpulan penelitian. Tautan antar kategori yang mudah diakses, deskripsi ringkas, dan bagan digunakan untuk menyampaikan informasi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam analisis data kualitatif, tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan diubah jika analis (peneliti) menemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data selanjutnya. Namun kesimpulan tersebut dapat dipercaya jika data pada kesimpulan pertama didukung oleh bukti yang tepat dan konsisten ketika analis (peneliti) diperbolehkan melakukan tinjauan sambil mengumpulkan data.

BAB II DESKRIPSI PROFIL DESA

A. Gambaran Umum Kalurahan Purwobinangun

Salah satu daerah yang berada di kawasan rawan bencana di sekitar Gunung Merapi adalah Kalurahan Purwobinangun yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota Yogyakarta di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara geografis Kelurahan Purwobinangun berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Timur : Desa Hargobinangun dan Candibinangun Kecamatan Pakem
- Sebelah Barat : Desa Donokerto dan Girikerto Kecamatan Turi
- Sebelah Utara : Hutan lindung Gunung Merapi
- Sebelah Selatan : Desa Donoharjo Kecamatan Nganglik

1. Visi Misi Lurah

Rumusan visi Lurah Purwobinangun periode tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Purwobinangun Yang Lebih Sejahtera, Berbasis Semangat Kemandirian, Keadilan, dan Pembangunan Berkelanjutan”*. Penjelasan atas visi tersebut dijabarkan pada tabel 2.1 *(terlampir)*

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi lurah pada periode 2021-2026 adalah melalui langkah-langkah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga masyarakat Purwobinangun yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dilandasi dengan toleransi beragama;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik berbasis pada akuntabilitas dan optimalisasi pelayanan masyarakat;
3. Melestarikan dan mengembangkan seni, adat, budaya, serta desa wisata dengan mengarusutamakan peran serta masyarakat;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pembangunan, serta jejaring ekonomi;
5. Mendorong kreatifitas dan inovasi dalam memasuki era industri 4.0.

Rumusan atas misi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan pada tabel 2.2 (*terlampir*)

2. Profil Kalurahan

1) Gambaran Demografi

a. Penduduk dan Keluarga

Hingga akhir tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Purwobinangun berjumlah 9.632 jiwa, terdiri dari 4.785 laki-laki dan 4.847 perempuan.

2.1 Tabel Jumlah Penduduk Bulan Oktober 2023

Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Kepala Keluarga

NO.	JENIS KELOMPOK	LAKI- LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	LAKI – LAKI	4785	49,68%	0	0,00%	4785	49,68%
2.	PEREMPUAN	0	0,00%	4847	50,32%	4847	50,32%
	TOTAL	4785	49,68%	4847	50,32%	9632	100%

Sumber: www.purwobinangun.slemankab.go.id

2.2 Tabel Perubahan Komposisi Penduduk 2019-2022 Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Menurut Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
1. Laki-Laki	4.756	4.829	4.781	4.772	4.785
2. Perempuan	4.807	4.878	4.846	4.846	4.847
Jumlah	9.563	9.707	9.627	9.618	9.632

Sumber: Diolah dari LPPD 2019, SIAK Kabupaten Sleman akses Desember 2020, www.purwobinangun.go.id

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian yang berhubungan dengan perkebunan, perikanan, dan pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi penduduk Kalurahan Purwobinangun. Pada awal Oktober 2022, tercatat 1.330 orang yang berprofesi sebagai petani/pekebun, buruh tani/perkebunan, dan buruh peternakan. Jumlah tersebut sebenarnya masih dapat bertambah karena banyak di antara penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian menuliskan pekerjaan lain didalam identitas kependudukannya. Berdasarkan mata pencaharian utamanya, berikut merupakan rincian jumlah penduduk di Kalurahan Purwobinangun dapat dilihat pada tabel 2.5 (*Terlampir*)

c. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pencapaian pendidikan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjukkan seberapa mudah diaksesnya peluang kerja di masyarakat; semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin banyak peluang kerja yang bisa mereka akses. Berdasarkan data latar belakang pendidikan, mayoritas masyarakat yang tinggal di Kalurahan Purwobinangun pada akhir tahun 2023 adalah lulusan SMA atau sederajat. Angka ini terdiri dari lulusan sekolah menengah atas yang saat ini terdaftar di perguruan tinggi.

Menurut latar belakang pendidikan, gambaran lengkap penduduk dapat dilihat dari tabel 2.6 di bawah ini.

**2.3 Tabel Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2022
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dalam KK**

No	JENIS KELOMPOK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
1.	TIDAK/BELUM SEKOLAH	925	9,62%	877	9,12%	1802	18,74%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	534	5,55%	592	6,16%	1126	11,71%
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	624	6,49%	681	7,08%	1305	13,57%
4.	SLTP/SEDERAJAT	629	6,49%	632	6,57%	1261	13,11%
5.	SLTA/SEDERAJAT	1555	16,17%	1462	15,20%	3017	31,37%
6.	DIPLOMA/ II	43	0,45%	65	0,68%	108	1,12%
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	110	1,14%	142	1,48%	252	2,62%
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	300	3,12%	347	3,61%	647	6,73%
9.	STRATA II	18	0,19%	19	0,20%	37	0,38%
10.	STRATA III	3	0,03%	7	0,07%	10	0,10%
	JUMLAH	4741	49,29%	4824	50,16%	9565	99,45%
	BELUM MENGISI	31	0,32%	22	0,23%	53	0,55%
	TOTAL	4772	49,62%	4846	50,38%	9618	100,00%

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun No.2 Tahun 2022 tentang RKP Kalurahan Th Anggaran 2023
www.purwobinangun.go.id

2) Keadaan Sosial

a. Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Salah satu unsur yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tingkat aksesibilitas terhadap penyedia dan fasilitas layanan kesehatan merupakan indikator penting kesejahteraan masyarakat. Terdapat 2 puskesmas pembantu di Padukuhan

Tawangrejo dan Padukuhan Gatep, dan di Padukuhan Jamblangan terdapat 1 klinik swasta dan 1 dokter praktek.

2.4 Tabel Jumlah Layanan Posyandu Di Kalurahan Purwobinangun Bulan Oktober Tahun 2023

No.	Padukuhan	Jumlah SDM Pelaksanaan Dan Sasaran			LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
		Jumlah Kader	Jumlah Balita	Jumlah Lansia	Posyandu Balita	Posyandu Lansia	Posbindu
1	Turgo	20	60	209	2	1	1
2	Ngepring	20	68	200	2	1	
3	Kemiri	13	37	110	1	1	1
4	Ngelosari	12	18	66	1	1	1
5	Tawangrejo	9	41	70	1	1	1
6	Wringin	13	30	65	1	1	1
7	Potro	8	13	40	1		
8	Watuadeng	9	25	84	1	1	1
9	Jamblang	15	28	84	1	2	1
10	Beneran	18	31	102	2	2	
11	Bunder	8	21	53	1	1	1
12	Kardangan	14	31	60	1	1	
13	Gatep	8	10	57	1	1	
14	Karanggeneng	9	23	83	1	1	1
15	Kadilobo	8	34	80	1	1	
16	Sembung	11	33	95	1	1	1
	JUMLAH	190	550	1171	20	13	6

Sumber : Data diolah dari data Kamituwa untuk LPPKai tahun 2022

b. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peristiwa yang terjadi di masyarakat digunakan untuk menggambarkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat penuh dengan konflik, seperti berikut:

1) Sengketa pertanahan

Perselisihan batas wilayah atau permasalahan yang berkaitan dengan warisan merupakan hal yang lumrah terjadi di industri ini. Mendorong diskusi antara pihak-pihak yang berbeda pendapat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul.

2) Perselisihan internal

Perselingkuhan, pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan perceraian adalah masalah rumah tangga yang umum terjadi. Meski difasilitasi kontemplasi dan mediasi, namun masih terdapat beberapa perselisihan keluarga yang belum terselesaikan dan harus dibawa ke Pengadilan Agama.

3) Pencurian

Pencurian adalah salah satu masalah umum dalam ketertiban dan keamanan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan keamanan lingkungan adalah dua solusi yang mungkin dilakukan.

4) Konflik tambang

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat sensitif, konflik dapat terjadi apabila pemanfaatannya menimbulkan kerugian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) 16 Kalurahan Purwobinangun Tahun 2023 kelompok-kelompok dalam masyarakat. Gejolak dapat terjadi di masyarakat karena terkait kepentingan konservasi sumber daya air dan berseberangan dengan

pertambangan rakyat. Pengaturan yang jelas atas kegiatan pertambangan rakyat sangat diperlukan sehingga semua unsur yang terkait tidak ada yang dirugikan.

c. Keluarga Pra Sejahtera

Kalurahan Purwobinangun memiliki 746 keluarga yang tergolong Keluarga Miskin (KKM) dan 1.885 Keluarga Miskin Rentan (KRM) menurut data tahun 2022. Persebaran keluarga yang termasuk dalam kategori KKM dan KRM relatif tidak merata. Padukuhan Ngepring menjadi padukuhan terbanyak yang memiliki penduduk yang termasuk dalam KKM dan KRM, berikut rincian persebarannya dalam tabel 2.8 (*terlampir*)

3. Kebijakan Pendapatan

Tujuan pengelolaan pendapatan kalurahan adalah untuk terus mencari sumber pendapatan baru sambil menyelidiki sumber-sumber pendapatan yang sebelumnya memberikan uang tunai kepada kecamatan. Segala penerimaan melalui rekening kecamatan yang menjadi hak kalurahan dalam waktu satu (satu) tahun anggaran dan tidak wajib dibayar kembali oleh desa, dianggap sebagai pendapatan desa. Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain merupakan tiga (3) komponen pendapatan yang membentuk anggaran pemerintah kalurahan.

a. Pendapatan Asli Kalurahan

Pemerintah Kalurahan diperkirakan akan mengandalkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) untuk mendanai pembangunan, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan administrasi pemerintahan. Tingkat ketergantungan Kalurahan terhadap uang yang dikirim menurun seiring dengan meningkatnya PAK.

2.5 Tabel Besaran Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Kalurahan Purwobinangun Tahun 2015-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1	2015	108.187.500,00	110.138.802,00	102%
2	2016	123.587.500,00	81.457.452,00	66%
3	2017	127.087.500,00	82.110.271,00	65%
4	2018	126.587.500,00	86.281.147,00	68%
5	2019	126.587.500,00	123.624.000,00	98%
6	2020	137.273.500,00	71.911.200,00	52%
7	2021	147.273.500,00	118.372.000,00	80%
8	2022	130.656.500,00	180.101.000,00	138%

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun No.2 Tahun 2023 tentang RKP Kalurahan Th Anggaran 2024

Sudah jelas bahwa dana transfer akan diberikan sesuai dengan peraturan dan arahan penggunaan. Perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya dapat terhambat jika tergantung pada dana transfer. Pada tahun 2022, Pemerintah Kalurahan Purwobinangun mengalami masalah dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) 20 Kalurahan Purwobinangun Tahun 2023, yang menyebabkan kalurahan sangat bergantung pada dana transfer ini. Prioritas pemberi dana lebih diutamakan dibandingkan anggaran yang telah diantisipasi sebelumnya, sehingga prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahun tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Dalam hal ini, prioritas pemerintah pusat penanganan COVID-19 sebesar 8%, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar 40%, dan Ketahanan Pangan sebesar 20% telah diperhitungkan dalam pengalokasian Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk inisiatif pembangunan.

Inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah Kalurahan Purwobinangun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK):

- a. Melakukan penilaian menyeluruh dan meningkatkan potensi sumber pendapatan di Kalurahan setempat;
 - b. Meningkatkan aliran pendapatan asli Kalurahan melalui investasi;
 - c. Memperluas jejaring dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain di bidang pendapatan Kalurahan;
 - d. Membentuk dan meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli Kalurahan;
 - e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar retribusi terhadap aset Kalurahan yang dimanfaatkannya;
 - f. Mengembangkan kemahiran mengelola aset dan keuangan Kalurahan.
- b. Pendapatan Transfer

Transfer tunai ke Kalurahan merupakan alat utama yang digunakan dalam pelaksanaan desentralisasi dan kewenangan Kalurahan. Pendapatan transfer adalah bagian pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, provinsi, dan daerah. Kebutuhan Kalurahan ditanggung oleh uang kiriman ini.

Pemerintah Kalurahan Purwobinangun menerima pendapatan transfer yang terdiri atas : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) 21 Kalurahan Purwobinangun Tahun 2023

- 1) Dana Desa (DD) dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang khusus

diperuntukkan bagi desa. Kemudian digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah kalurahan termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 4) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah bantuan yang diberikan kepada kalurahan berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya telah ditetapkan secara rinci oleh pemerintah daerah. BKK ini dapat bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman ataupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**2.6 Tabel Besaran Dana Tranfer Yang Diterima
Kalurahan Purwobinangun Tahun 2019-2022**

No	Pendapatan	2019	2020	2021	2022
1	Dana Desa	1.239.245.000	1.313.101.000	1.327.747.000	1.188.826.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	587.675.215	454.948.766	517.689.249	715.916.072
3	Alokasi Dana Desa	1.513.716.480	1.374.830.679	1.361.300.453	1.300.909.735
4	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	112.790.500	175.000.000
5	Pemerintah Kabupaten Sleman	963.716.000	397.645.950	220.000.000	578.000.000

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun No.2 Tahun 2023 tentang RKP Kalurahan Th Anggaran 2024

c. Pendapatan lain-lain

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Lain-Lain” antara lain adalah hasil kerja sama antar Kalurahan, hasil kerja sama desa dengan pihak luar, bantuan yang diterima dari usaha-usaha yang berada di dalam Kalurahan, hibah dan sumbangan pihak luar, bunga perbankan, dan lain-lain yang merupakan penghasilan yang sah.

Dari tahun ke tahun, bunga bank masih menjadi faktor penyumbang terbesar di antara berbagai komponen pendapatan lainnya. Hibah diberikan pada tahun 2020 sebagai hasil kunjungan Gubernur DIY; Namun diputuskan bahwa uang tersebut hanya dapat digunakan untuk membangun tangga atau jalan menuju pemakaman Syekh Jumadil Kubro di Bukit Turgo dan itu tidak diizinkan digunakan untuk mendanai proyek lain.

Berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan Pemerintah Kalurahan Purwobinangun dalam upaya menambah pendapatannya sebagai berikut :

- 1) Memperluas akses terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) agar dapat diberikan ke Kalurahan Purwobinangun;

- 2) Mengajak perusahaan ataupun swasta yang ada di wilayah Purwobinangun untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kalurahan Purwobinangun; dan
- 3) Memperbanyak kerjasama dengan masyarakat ataupun pihak swasta dalam pengelolaan aset kalurahan;

4. Kebijakan Belanja

Penyelenggaraan kewenangan Kalurahan dibiayai oleh belanja Kalurahan. Tujuan belanja Kalurahan adalah untuk menjamin pendanaan dan pelaksanaan seluruh inisiatif strategis. Belanja sebaik-baiknya dilakukan untuk membiayai urusan sesuai dengan pengelolaan otoritas Kalurahan.

Beberapa bidang yang menjadi fokus dalam belanja Kalurahan sebagai berikut :

1. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Klasifikasi belanja kalurahan menurut jenis obyek belanja terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai yaitu untuk penghasilan tetap, tunjangan, pendapatan lain yang dapat diterima, dan tunjangan BPKal di samping pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Pamong kalurahan.

2. belanja barang dan jasa, yaitu belanja untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah kalurahan;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana kalurahan;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
3. Belanja modal, merupakan belanja yang bertujuan mengadakan barang yang nilai manfaatnya mencapai lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
4. Pengeluaran tak terduga, yaitu biaya yang berkaitan dengan keadaan darurat kecamatan setempat, penanggulangan bencana, dan situasi mendesak. Kegiatan subsektor penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat terhadap bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana sosial.

**2.7 Tabel Realisasi Belanja Per Bidang Kewenangan
Kalurahan Purwobinangun Tahun 2019-2022**

No	BIDANG	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1.780.721.651	2.122.517.230	2.219.980.880	2.041.572.184
2	Pelaksanaan Pembangunan	1.730.308.630	1.003.849.550	1.662.195.460	963.891.030
3	Pembinaan Kemasyarakatan	426.542.748	103.657.020	69.574.060	264.370.600
4	Pemberdayaan Masyarakat	649.883.230	103.657.020	69.999.970	446.640.762
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	7.975.080	668.439.880	829.259.155	580.176.173
Jumlah		4.595.431.339	4.002.120.700	4.851.009.525	4.296.650.749

Sumber : Realisasi APBKal Tahun 2018-2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja di bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun-tahun setelahnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Pemerintah fokus pada pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada tahun berikutnya pendanaan Kalurahan lebih banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga penyaluran dana untuk pemberdayaan masyarakat dikurangi.

Kebijakan belanja Kalurahan Purwobinangun dilaksanakan melalui pola pengaturan belanja yang efisien, efektif, dan proporsional. Tindakan yang akan dilakukan terdiri dari:

1. Pedoman utama pengalokasian anggaran Kalurahan adalah menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pelaksanaan anggaran dialokasikan pada inisiatif yang secara langsung (langsung dirasakan) dan tidak langsung (bersifat investasi) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar belanja Kalurahan dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu. Selain itu, prosedur ini akan

mendorong perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, administrasi, dan akuntabilitas yang lebih cepat.

2. Pemanfaatan anggaran ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan. memanfaatkan anggaran belanja dengan tetap memperhatikan kesepakatan dan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta maksud dan tujuan yang dimaksudkan.
3. Penggunaan pagu anggaran indikatif yang ditentukan oleh kemampuan keuangan Kalurahan, tujuan yang ingin dicapai, misi yang ingin dilaksanakan, arah kebijakan, dan prioritas kegiatan sesuai dengan wilayah hukum Kalurahan.

RPJMKal telah memutuskan sejumlah kegiatan yang dijadwalkan. Seluruh dusun dan/atau kelompok terpaksa mengupayakan agar rencana mereka dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan melalui proses pengusulan sistem terbuka. Artinya, ada kemungkinan beberapa kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen RPJMKal tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Dengan demikian, tugas-tugas yang wajar dan prioritas dapat diputuskan setiap tahunnya dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa. Usulan yang sudah ada dan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 2021–2026 akan dimasukkan kembali ke dalam dokumen perencanaan untuk jangka waktu berikutnya.

5. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan mengacu pada semua uang yang diperoleh pemerintah Kalurahan yang harus diganti dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berikutnya. Bisa saja terjadi defisit atau surplus anggaran pada setiap proses penyusunan anggaran. Bila pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan kurang dari kebutuhan belanja dalam satu tahun anggaran, maka timbullah defisit anggaran.

Kesenjangan anggaran dibiayai oleh keuangan Kalurahan. Pengeluaran keuangan diberikan prioritas utama untuk pengeluaran yang diperlukan, seperti mendanai krisis yang mendesak, upaya bantuan bencana, dan kegiatan prioritas. Pendanaan investasi seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang berorientasi pada keuntungan dan/atau berupaya untuk berkembang menjadi tujuan berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari hasil penjualan aset yang dipisahkan (selain tanah dan bangunan), SiLPA tahun sebelumnya, dan pembagian uang cadangan.
2. biaya pendanaan. Penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan merupakan beban pendanaan. Dana cadangan dibentuk untuk membiayai proyek-proyek yang pendanaannya tidak dapat disediakan secara penuh dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka mendongkrak pendapatan daerah atau pelayanan masyarakat, penyertaan modal dimanfaatkan untuk menganggarkan aset pemerintah Kalurahan yang ditanamkan pada BUMDes. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan prosedur analisis kelayakan untuk melakukan penanaman modal pada BUMDes.

6. Pemerintah Kalurahan

Seorang Kepala Desa bertugas mengawasi seluruh operasional pemerintahan Kalurahan dan memimpin Kalurahan serta bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta menangani keadaan darurat dan bencana. Sekretariat kecamatan, pelaksana teknis, dan pelaksana daerah merupakan tiga (tiga) komponen struktur organisasi Pemerintah Kecamatan. Kepala desa meminta pertanggungjawaban ketiga kelompok ini atas pelaksanaan tugasnya. Selain itu, pegawai aparatur sipil negara kecamatan dapat membantu sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana

daerah dalam menjalankan tugasnya. Di bawah arahan Carik, sekretariat kecamatan bertugas mendukung camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Sekretariat kecamatan bertugas mengelola urusan keuangan, administrasi, dan umum serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan. Tiga kepala urusan Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana, dan Kaur Pangripta membantu Carik dalam menjalankan tugasnya sebagai asisten adalah pelaksana teknis.



7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJM Kalurahan

Permasalahan yang akan dihadapi Pemerintah Kalurahan Purwobinangun pada tahun 2021–2026 telah diidentifikasi dan dirumuskan dalam Peraturan Kalurahan Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2021 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan. Metode analisis teknokratis dan diskusi masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi, membuat daftar, dan mengartikulasikan isu-isu ini. Perencanaan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Purwobinangun 31 Tahun 2023 dilaksanakan

pada tingkat paling bawah melalui proses partisipatif yang meliputi penelusuran kebutuhan, gagasan, dan permasalahan dengan harapan dapat menangkap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Dijelaskan dalam tabel 2.12 (*terlampir*)

B. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kalurahan Purwobinangun

Kalurahan Purwobinangun merupakan salah satu penghasil pertanian salak pondoh, hampir mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani salak, untuk meningkatkan nilai jual produksi salak, masyarakat berinovasi mengubah buah salak menjadi produk olahan makanan. Sehingga membentuk beberapa UMKM seperti di tabel 2.13 (*terlampir*)

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa jenis olahan salak yang menjadi komoditas dalam produk olahan salak yang dikembangkan oleh UMKM, meski dalam proses pengolahannya belum mencapai skala yang besar namun sudah sangat berkembang pesat bagi kesejahteraan UMKM. Dimana salak lebih memiliki nilai jual yang menjamin setelah menjadi produk olahan seperti keripik, manisan, dodol, pie, tepung, dan minuman, sehingga secara tidak langsung membawa dampak yang positif juga bagi pelaku UMKM serta para petani salak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari bab pembahasan diatas, peneliti mengetahui bahwa Pemerintah kalurahan Purwobinangun belum menjalankan peran Pemerintahan dengan baik secara penuh dalam pemberdayaan UMKM. peran dari Pemerintah kalurahan juga belum terlihat, dimana dalam hal ini program yang dijalankan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang di keluhkan UMKM. Kalurahan hanya menjalankan program secara umum sehingga kurang memberikan solusi atas persoalan yang terjadi. Pemerintah Kalurahan sudah berupaya memfasilitasi UMKM seperti mengadakan program pelatihan bagi anggota UMKM, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang pengolahan salak sehingga memiliki nilai jual dan diminati masyarakat luas. Upaya Pemerintah Kalurahan tersebut disambut dengan sangat baik oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM, namun belum bisa secara maksimal karena terkendala dana yang mana banyak kebutuhan lain yang lebih menjadi prioritas Kalurahan.

Keterampilan Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan UMKM dapat terlihat dari program pelatihan yang diadakan bagi UMKM, untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat produk olahan salak. Meskipun dalam realisasi pelaksanaan program pelatihan yang hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, karena terkendala minimnya pendanaan yang dialokasikan pada program pemberdayaan tersebut.

Pengetahuan pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan UMKM di kalurahan purwobinangun cukup terbatas, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian saya dimana peran dari pemerintah kalurahan sendiri dalam perkembangan UMKM belum

maksimal dimana pemerintah hanya hadir sebatas kepentingan eksternal sebagai perwakilan pemerintahan, pelaku UMKM berusaha secara mandiri untuk kesejahteraan mereka.

Motivasi dalam pemberdayaan ini karena dengan hadirnya UMKM dapat membantu perekonomian masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. Maka Pemerintah Kalurahan berupaya memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, sehingga terciptanya inovasi dan kreatifitas pada anggota UMKM. Dengan demikian terciptanya keberlangsungan dan kemajuan UMKM, akan memberikan kesejahteraan bagi para anggota UMKM.

Peneliti juga menemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan, keterbatasan dana yang dianggarkan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan menjadi faktor penghambat. Sedangkan keterlibatan dan perhatian langsung dari dinas yang memberikan pelatihan pada UMKM dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UMKM menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM. Kurangnya kepedulian Pemerintah Kalurahan terhadap UMKM, namun walaupun demikian UMKM secara mandiri berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dalam pemberdayaan UMKM.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kelurahan harus lebih memfasilitasi dan memdampingi para pelaku UMKM agar lebih produktif dan berkembang dalam kreatifitas olahan salak, agar menciptakan inovasi baru sehingga memiliki nilai jual tinggi yang kemudian membawa para pelaku UMKM lebih sejahtera.
2. Para pelaku UMKM dapat mengkomunikasikan kebutuhan terkait pengembangan UMKM pada pemerintah kalurahan, agar kendala yang selama ini dialami dalam proses produksi dapat dicari penyelesaiannya. Sehingga waktu dan tenaga dalam pengolahan dapat dibantu dengan tenaga mesin, untuk mempersingkat waktu produksi serta agar menghasilkan produk yang maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J. B., dan Clark, D. N., 2007, “*Resource-Based View Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage*”, Oxford University Press Inc, New York
- Bevaola Kusumasari, 2014, *Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Departemen Pendidikan Nasional (2014) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- Makadok, R. 2001. *Toward a Synthesis of The Resource-Based and Dynamic-Capability Views of Rent Creation*. Strategic Management Journal, 22(5): 387–401.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Priyono, O. S. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Moleong (2004)
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

SITUS WEBSITE

www.purwobinangun.slemankab.go.id

www.purwobinangun.go.id

LAIN-LAIN

Arsip Data Kalurahan

LAMPIRAN

2.8 Tabel Penjelasan Visi

No.	Kalimat/Frasa	Penjelasan
1.	“Terwujudnya”	Artinya: dapat terjadi; terbukti (KBBI). Menunjuk kepada suatu kondisi ideal yang diharapkan akan terjadi;
2.	“Purwobinangun”	<p>Dapat dimaknai sebagai penduduk, masyarakat ataupun wilayahnya. Penduduk artinya: orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya) (KBBI). Wilayah artinya: daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan) (KBBI).</p> <p>Penduduk dan masyarakat merepresentasikan subyek-pelaku, komponen yang bersama-sama akan melaksanakan-mewujudkan-bekerjasama untuk mencapai kondisi ideal yang akan dicita-citakan, <i>Stakeholder</i> yang memiliki kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) dalam setiap tahapan menuju cita-cita yang diinginkan.</p> <p>Wilayah merepresentasikan obyek, sebuah kawasan yang memiliki batas-batas tertentu yang membedakannya dengan tempat lain.</p>
3.	“Lebih Sejahtera”	<p>Lebih aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). (KBBI)</p> <p>Frasa ”lebih sejahtera”merujuk kepada keadaan yang lebih baik, kondisi yang menunjukkan telah melewati keadaan saat ini. Lebih sejahtera berarti suatu kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan lebih makmur, keadaan lebih sehat dan lebih damai.</p>
4.	“Kemandirian”	<p>Hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain (KBBI).</p> <p>merujuk pada keadaan di mana masyarakat Purwobinangun mampu menjadi subyek pembangunan, mampu menemukan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki, serta memanfaatkan peluang dan momentum yang</p>

No.	Kalimat/Frasa	Penjelasan
		didapatkan.
5.	“Keadilan”	<p>Keadilan artinya sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil (KBBI).</p> <p>Merujuk kepada sebuah kondisi dimana seluruh elemen masyarakat merupakan subyek dan obyek pembangunan, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dengan peran sesuai kemampuan mereka sendiri-sendiri. Diartikan pula kondisi yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak “<i>emben cinde emben siladan</i>”. Adil tidak berarti harus sama, namun merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa semua mendapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, sesuai tingkatan kemampuan dan prioritas.</p>
6.	“Berkelanjutan”	<p>Berkelanjutan artinya : berlangsung terus-menerus; berkesinambungan (KBBI).</p> <p>Merujuk kepada suatu keadaan dimana hasil yang telah dicapai pada masa lalu akan tetap dijaga, dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar.</p>

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Kalurahan Tahun 2021-2026. www.purwobinangun.slemankab.go.id

9.2 Tabel Penjelasan Misi

No.	Misi
1.	<p>Menjaga Masyarakat Purwobinangun Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama Yang Dilandasi Dengan Toleransi Beragama;</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Sebagai sebuah negara demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat.</p> <p>Sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Kalurahan Purwobinangun selama ini telah mampu menunjukkan sikap religiusitas, rukun, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan mereka berdasarkan agama, moral, dan etika. Nilai-nilai agama selama ini digunakan sebagai perajut kebersamaan dengan berlandaskan toleransi. Keadaan yang telah baik tersebut harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya.</p>

No.	Misi
2.	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Yang Berbasis Pada Akuntabilitas Dan Optimalisasi Pelayanan Masyarakat;</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Pemerintahan dengan tata kelola yang efektif dan baik wajib dimiliki oleh semua lembaga pemerintahan, tidak terkecuali pemerintah kabupaten/kota. Semua lembaga pemerintah, termasuk pemerintah kecamatan, harus menerapkan tata kelola yang baik dan efisien. Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, maka harus ditingkatkan agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pegawai pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum dan Prosedur Operasional Standar.</p>
3.	<p>Melestarikan Dan Mengembangkan Seni, Adat, Budaya, Serta Desa Wisata Dengan Mengarusutamakan Peran Serta Masyarakat;</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai hasil kecerdikan, preferensi, dan inisiatif manusia. Kebudayaan sebagai identitas bangsa mempengaruhi dinamika pembangunan global. Identitas dan norma sosial perlu diperkuat sebagai respons terhadap perubahan yang sangat cepat akibat kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi, melestarikan, memajukan, dan mengembangkan kebudayaan serta memanfaatkannya sebagai investasi membangun masa depan, seluruh pihak yang terlibat di Kabupaten Purworejo harus bekerja sama.</p> <p>Diharapkan melalui pelestarian budaya, masyarakat akan menjadi lebih sadar akan nilai pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan standar hidup setiap orang dan akan lebih kooperatif, bertanggung jawab, dan sadar akan tanggung jawab bersama. Selain itu, terdapat pengakuan bahwa inisiatif pembangunan merupakan upaya tim yang menggabungkan seluruh aspek masyarakat dan bukan semata-mata tanggung jawab pejabat pemerintah.</p>
4.	<p>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dengan optimalisasi Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Dan Sumber Daya Pembangunan, Serta Jejaring Ekonomi;</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Sangat penting bagi perusahaan masyarakat untuk menerima dukungan dan bantuan dalam membangun perekonomian lokal yang lebih kuat dengan menggunakan aset unik mereka. Kegiatan perekonomian masyarakat perlu didukung dan didorong melalui pemeliharaan, peningkatan, pemanfaatan, penanaman modal, dan penyelenggaraan prasarana yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan, kesehatan, agama, budaya, dan olahraga.</p> <p>Pengelolaan potensi sumber daya alam, sumber daya pembangunan, dan sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapkan juga dapat didorong melalui pengembangan hub dan</p>

No.	Misi
	titik pertumbuhan, pemanfaatan jaringan ekonomi, serta penataan ruang dan wilayah.
5.	<p>Mendorong Kreatifitas Dan Inovasi Dalam Memasuki Era Industri 4.0.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Sangat penting untuk memberikan respons terbaik terhadap perkembangan yang telah menggerakkan dunia modern menuju dunia digital. Kemajuan teknologi informasi dalam birokrasi pemerintahan memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta integrasi dan modernisasi infrastruktur teknologi informasi secara bertahap dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan taraf hidup, masyarakat harus mengenalinya sebagai peluang baru yang memerlukan kreativitas dan inovasi yang lebih besar. Oleh karena itu, bantuan yang semaksimal mungkin harus diberikan untuk tumbuhnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.</p>

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026, www.purwobinangun.slemankab.go.id

**2.10 Tabel Jumlah Penduduk Bulan Oktober 2023
Menurut Mata Pencapaian Utama**

NO	JENIS KELOMPOK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1056	10,96%	915	9,50%	1971	20,46%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	7	0,07%	1670	17,34%	1677	17,41%
3	PELAJAR/MAHASISWA	885	9,19%	810	8,41%	1695	17,60%
4	PENSIUNAN	118	1,23%	58	0,60%	176	1,83%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	121	1,26%	122	1,27%	243	2,52%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	12	0,12%	4	0,04%	16	0,17%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	17	0,18%	1	0,01%	18	0,19%
8	PERDAGANGAN	11	0,11%	17	0,18%	28	0,29%
9	PETANI/PEKEBUN	751	7,80%	366	3,80%	1117	11,60%
10	PETERNAK	7	0,07%	4	0,04%	11	0,11%
11	NELAYAN/PERIKANAN	1	0,01%	1	0,01%	2	0,02%
12	INDUSTRI	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%
13	KONSTRUKSI	3	0,03%	0	0,00%	3	0,03%
14	TRANSPORTASI	3	0,03%	0	0,00%	3	0,03%

NO	JENIS KELOMPOK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
15	KARYAWAN SWASTA	827	8,59%	485	5,04%	1312	13,62%
16	KARYAWAN BUMN	8	0,08%	4	0,04%	12	0,12%
17	KARYAWAN HONORER	16	0,17%	13	0,13%	29	0,30%
18	BURUH HARIAN LEPAS	267	2,77%	42	0,44%	309	3,21%
19	BURUH TANI/PERKEBUNAN	122	1,27%	44	0,46%	166	1,72%
20	BURUH PETERNAKAN	2	0,02%	0	0,00%	2	0,02%
21	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0,00%	6	0,06%	6	0,06%
22	TUKANG BATU	5	0,05%	0	0,00%	5	0,05%
23	TUKANG KAYU	5	0,05%	0	0,00%	5	0,05%
24	TUKANG JAHIT	0	0,00%	3	0,03%	3	0,03%
25	PENATA RAMBUT	0	0,00%	2	0,02%	2	0,02%
26	MEKANIK	10	0,10%	1	0,01%	11	0,11%
27	SENIMAN	2	0,02%	1	0,01%	3	0,03%
28	PENERJEMAH	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
29	PENDETA	2	0,02%	0	0,00%	2	0,02%
30	WARTAWAN	2	0,02%	1	0,01%	3	0,03%
31	JURU MASAK	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%
32	DOSEN	7	0,07%	6	0,06%	13	0,14%
33	GURU	26	0,27%	84	0,87%	110	1,14%
34	ARSITEK	2	0,02%	0	0,00%	2	0,02%
35	DOKTER	2	0,02%	1	0,01%	3	0,03%
36	BIDAN	0	0,00%	5	0,05%	5	0,05%
37	PERAWAT	0	0,00%	9	0,09%	9	0,09%
38	APOTEKER	0	0,00%	1	0,01%	1	0,01%
39	PELAUT	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
40	SOPIR	34	0,35%	0	0,00%	34	0,35%
41	PEDAGANG	17	0,18%	26	0,27%	43	0,45%
42	PERANGKAT DESA	23	0,24%	3	0,03%	26	0,27%

NO	JENIS KELOMPOK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
43	KEPALA DESA	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
44	WIRASWASTA	379	3,93%	126	1,31%	505	5,24%
45	LAINNYA	5	0,05%	2	0,02%	7	0,07%
	JUMLAH	4758	49,40%	4835	50,20%	9593	99,60%
	BELUM NGISI	27	0,28%	12	0,12%	39	0,40%
	TOTAL	4785	49,68%	4847	50,32%	9632	100,00%

Sumber : www.purwobinangun.go.id 2023

2.11 Tabel Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2022

No	Padukuhan	KKM	KRM	Jumlah
1	Turgo	89	338	427
2	Ngepring	105	391	496
3	Kemiri	9	71	80
4	Ngelosari	54	76	130
5	Tawangrejo	41	182	223
6	Wringin	24	77	101
7	Potro	14	66	80
8	Watuadeng	16	78	94
9	Jamblang	29	24	53
10	Beneran	28	92	120
11	Bunder	38	48	86
12	Kardangan	95	173	268
13	Gatep	7	21	28
14	Karanggeneng	45	87	132
15	Kadilobo	40	36	76
16	Sembung	92	179	271
	Jumlah	726	1939	2665

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun No.2 Tahun 2023 tentang RKP Kalurahan Th Anggaran 2024

2.12 Tabel Permasalahan Bidang Kewenangan Kalurahan dan Permasalahan Dari Kajian Padukuhan

No.	Bidang	Permasalahan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi peningkatan kegiatan rutin pemerintahan kalurahan; 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 3. Memfasilitasi Kerjasama Antar Kalurahan; 4. Peningkatan kinerja dan kapasitas perangkat kalurahan dan lembaga kalurahan; 5. Pelaksanaan pendataan dan penandaan aset kalurahan berupa tanah kas kalurahan; 6. Penyusunan profil kalurahan secara periodik; 7. Pembaharuan kelembagaan kalurahan mulai dari tingkat RT sampai tingkat kalurahan
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi fasilitas dasar masyarakat kalurahan dalam hal pembangunan dan atau rehabilitasi infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat (Jalan Lingkungan, Jembatan, Jalan Pertanian, Irigasi, Drainase). 2. Membuat sistem administrasi induk kalurahan dengan menyediakan web kalurahan sebagai bagian dari pemberian informasi pembangunan dan kependudukan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kalurahan berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, kesehatan, sekolah, dan pusat pemerintahan. 4. Pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai unit usaha kalurahan. 5. Meningkatkan penyampaian informasi pembangunan kalurahan yang akurat, akuntabel, dan berkelanjutan dengan papan informasi.

No.	Bidang	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyiapkan kelengkapan sarana prasarana menuju kalurahan tujuan wisata di kawasan Sleman utara. 7. Menyiapkan sarana prasarana sebagai kalurahan tanggap bencana
3	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal. 2. Memberikan dukungan bagi masyarakat melalui penyediaan kesempatan usaha, kewirausahaan, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, akses ke pemasaran. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok usia produktif (Pemuda, Kelompok Wanita) dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan. 4. Penyiapan dan memberikan akses masyarakat atas kemajuan teknologi dengan memfasilitasi kawasan bebas internet (Free WIFI). 5. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam kegiatankegiatan yang bersifat meningkatkan sifat kepedulian lingkungan, kegotongroyongan dan keamanan lingkungan
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Sosial Budaya Masyarakat Dan Keadilan Gender (Kelompok Wanita, Pemuda, Anak). 2. Perwujudan Kemandirian Pangan Dan Pengelolaan SDA Yang Berkelanjutan Dengan Memanfaatkan Inovasi Dan Teknologi Tepat Guna Di Kalurahanan (Dari Sektor Pertanian). 3. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Kalurahan Yang Berbasis Komoditas Unggulan (Padi Lokal, Dll), Melalui Pengembangan Kawasan/ Lahan Pendukung, Peningkatan Produktivitas, Serta Penerapan Ekonomi Hijau (Organik).

No.	Bidang	Permasalahan
		<p>4. Menyediakan Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dan Produksi Olahan.</p> <p>5. Meningkatkan Akses Masyarakat Kalurahan Terhadap Modal Usaha, Pemasaran Dan Informasi Pasar.</p> <p>6. Mengembangkan Lembaga Pendukung Ekonomi Kalurahan Keterkaitannya Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).</p>

Sumber : Peraturan Kalurahan Purwobinangun No.2 Tahun 2022 tentang RKP Kalurahan Th Anggaran 2023

2.13 Tabel UMKM Kalurahan Purwobinangun

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Tahun Berdiri	Sektor PDRB	Produk Komoditas
1.	Rini Handayani	Sarisa Merapi	2016	Industri Pengolahan	Keripik Salak
2.	L. Marwati	L. Marwati	2021	Perdagangan besar dan eceran	Manisan Salak
3.	Eko	Lokasari	2021	Industri Pengolahan	Minuman Salak
4.	Rumtiana	Rumtiana	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Dodol Salak
5.	Suwoto	Suwoto	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Pie Salak
6.	Tuty Haryati	Hanan Salacca	2021	Industri Pengolahan	Tepung Salak
7.	Eka Winarna	Naufresh Salacca	2021	Industri Pengolahan	manisan Salak
8.	Tati Dwi Astuti	Ranum	2021	Industri Pengolahan	Dodol Salak
9.	Marsinem	Marsinem	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Tepung Salak
10.	Benedictus Suratimin	Suratimin	2021	Perdagangan	Keripik

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Tahun Berdiri	Sektor PDRB	Produk Komoditas
				Besar dan Eceran	Salak
11.	Anang setyo Widodo	Affan Buah	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Pie Salak
12.	Arjo/saliyem Arjo Mulyono	Arjo/saliyem Arjo Mulyono	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Dodol Salak
13.	Istiqomah	Istiqomah	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Manisan Salak
14.	Jumini	Jumini	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Minuman Salak
15.	Doyo Sumarto	Doyo Sumarto	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Keripik Salak
16.	Ngatini	Ngatini	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Pie Salak
17.	Wiwik Suramini	Wiwik Suramini	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Manisan Salak
18.	Sri Rahayu	Sri Rahayu	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Dodol Salak
19.	Supari	Supari	2021	Perdagangan Besar dan Eceran	Keripik Salak

Sumber : Arsip Data Kalurahan

PEDOMAN WAWANCARA

Hari / Tanggal :

Nama Lengkap :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan/Posisi :

PERTANYAAN	
Keterampilan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM	
1.	Apakah langkah yang diambil Pemerintah Desa dalam upaya memajukan UMKM ?
2.	Bagaimana upaya Pemerintah untuk membantu pemasaran produk olahan salak ?
3.	Apakah Pemerintah Desa sering mengadakan pelatihan untuk menunjang inovasi produk olahan salak ?
4.	Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa untuk pemberdayaan UMKM?
5.	Apakah Pemerintah Desa membantu pendanaan untuk pelatihan UMKM ?
6.	Upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan UMKM?
7.	Strategi Apa Yang Dilakukan Pemerintah desa Untuk Pemberdayaan UMKM?
8.	Apakah Pemerintah Desa rutin mengadakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas olahan salak ?

9.	Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk membangun relasi dengan masyarakat dan pihak swasta untuk perkembangan UMKM?
10.	Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Kapasitas UMKM?
Pengetahuan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM	
11.	Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa jika terjadi masalah pada UMKM ?
12.	Sejauh mana Peran Penting Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan UMKM?
13.	Hal apa saja yang harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan UMKM?
14.	Strategi apa yang harus dilakukan dalam pemberdayaan UMKM?
15.	Sejauh apa perkembangan UMKM yang ada di desa?
16.	Bagaimana kesejahteraan pelaku UMKM yang ada di desa?
17.	Apa saja yang menjadi permasalahan UMKM yang ada di desa?
18.	Bagaimana pemerintah desa mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi terhadap UMKM?
19.	Mengapa pemberdayaan UMKM harus dilakukan?
20.	Apakah program UMKM yang berjalan saat ini memberikan pengaruh yang cukup baik untuk pemberdayaan UMKM?
Motivasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan UMKM	
21.	Siapa yang berperan penting dalam memberdayakan UMKM?
22.	Apa maksud dari pemberdayaan UMKM?
23.	Bagaimana sikap pemerintah desa dalam menghadapi keluhan pelaku UMKM?
24.	Hal apa yang menjadi alasan untuk pemerintah desa mengembangkan UMKM?
25.	Mengapa pemberdayaan UMKM sangat penting?

26.	Apa tujuan dari pemberdayaan UMKM?
27.	Apa harapan pemerintah desa untuk perkembangan UMKM?
28.	Program apa yang sudah direncanakan pemerintah desa untuk pemberdayaan UMKM?
29.	Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan UMKM?
30.	Bagaimana cara pemerintah desa untuk meningkatkan SDM pelaku UMKM?
Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat	
31.	Apakah Pemerintah Desa menyediakan pelatihan bagi UMKM dalam usaha meningkatkan kapasitas ?
32.	Apakah ada aturan yang di buat Pemerintah Desa untuk mengatur UMKM agar lebih terorganisir ?
33.	Apa Saja peran Pemerintah Desa dalam mendukung PemberdayaanUMKM?
34.	Apa Solusi dari Pemerintah Desa Untuk Permasalahan Yang Menjadi Penghambat Dalam PemberdayaanUMKM?
35.	Apa saja program yang telah dijalankan Pemerintah Desa dalam upaya mendukung pemberdayaanUMKM?
36.	Bagaimana pertimbangan Pemerintah Desa dalam memilih program pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan petani salak dan pelaku UMKM?
37.	Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung Untuk Meningkatkan Pemberdayaan UMKM?
38.	Bagaimana respon petani salak dan pelaku UMKM apabila program pelatihan dari Pemerintah Desa kurang sesuai dengan yang dibutuhkan ?
39.	Apakah petani salak dan pelaku UMKM dilibatkan dalam penyusunan program ?
40.	Bagaimana respon Pemerintah Desa jika terjadi masalah yang menghambat perkembangan pemberdayaan UMKM

DOKUMENTASI



PAK YUDI, KAMITUA



IBU TATI DWI ASTUTI, PELAKU UMKM

DODOL SALAK



PAK WARSONO, ULU-ULU



IBU RAMTIANA, PELAKU UMKM

MANISAN SALAK



<p>IBU RINI HANDAYANI, PEMILIK UMKM SARISA MERAPI DAN KETUA KWT</p>	<p>PAK MERU, PENANGGUNG JAWAB UMKM KALURAHAN PURWOBINANGUN</p>
	
<p>PAK SIGIT, DUKUH DAN KELOMPOK TANI SALAK</p>	<p>PAK PARJIONO, DUKUH DAN KELOMPOK TANI SALAK</p>
	
<p>PAK AGUS, BPKAL POKJA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<p>PAK PUR, PERANGKAT KALURAHAN</p>